



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Agustus 2012

Halaman: 1

Rame-rame Tangani Masalah Malioboro

Sudah tiga tahun ini semua masalah dan penanganan di Malioboro dilakukan secara terpadu melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berbagai masalah mulai dari ekonomi, pembangunan infrastruktur, sosial, budaya, hukum ditangani. Meski beban kerja yang dijalankan setingkat dinas, namun dikepalai pejabat setingkat lurah.

SEJAK tahun 2009 UPT Malioboro didirikan untuk mengkoordinasikan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Pemkot Yogya-

karta dalam menangani Malioboro. Ada enam SKPD utama yang terlibat, yakni Kimpraswil, Disperindagkoptan, Dinas

Perhubungan, Dinas Ketertiban, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Lingkungan Hidup. Tidak keting-

galan bermitra dengan tiga kecamatan yang memangku kawasan Malioboro.

"Fungsi utama adalah tangnan-tangan atau sekretariat bersama para dinas agar terpadu. Secara biologi bapak saya banyak, induknya UPT tapi hak asuhnya milik semua SKPD terkait," kata Syarif Teguh, Kepala UPT Malioboro, kepada *Merapi*, pekan lalu.

Selain sebagai sekretariat bersama, UPT Malioboro juga membuka pos pengaduan dari berbagai pihak. Dari pengaduan itu ditampung, diterjemahkan dan didistribusikan ke SKPD terkait untuk ditangani. Beberapa SKPD juga memberikan pelimpahan kecil. Seperti retribusi dan pembinaan juru parkir di Malioboro.

**Nyambung halaman 11*



Syarif Teguh

MERAPI-TRI DARMIYATI

Rame-rame

Sambungan halaman 1

"Kalau dulu orang atau organisasi mau mengadakan kegiatan atau penelitian di Malioboro mereka melapor ke semua dinas terkait. Kini bisa melapor di UPT Malioboro," urainya.

Personel di UPT Malioboro ada 99 orang meliputi 16 PNS, 32 orang Satpol PP, administrasi, petugas kebersihan, taman serta petugas keamanan. Dia mengatakan, UPT Malioboro hanya salah satu komponen pemangku kepentingan di Malioboro. Sebab pemerintah pusat, provinsi juga memiliki kepentingan.

Diakuinya, mengampu di Malioboro cukup rumit. Pasalnya menempatkan UPT harus bisa menampung mengkomunikasikan dengan bahasa teknis dari SKPD dan menerjemahkan pengaduan.

"Beban utama seperti dinas, tapi diampu pejabat setingkat eselon IV seperti lurah. Karena baru uji coba ya UPT dulu untuk memadukan SKPD menangani Malioboro. Tapi ini pengalaman menarik bagi saya," papar lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) angkatan 2000 ini.

Menurutnya, Malioboro tidak pernah libur, karena selalu ada wisatawan yang datang. Pengalaman menarik dengan keberadaan pos pengaduan yang selalu banjir saat liburan. Banyak pengunjung yang tertinggal rombongan, anak terpisah dan kehabisan bekal. Kondisi ini mengetuk jiwa sosial yang bekerja di UPT dengan patungan membelikan tiket untuk dipulangkan.

"Begitu pula jika ada yang

menemukan barang atau dompet. Masyarakat mengapresiasi dengan ucapan terima kasih. Ini yang membuat teman-teman di UPT terkesan dan merasakan langsung kerjanya," ujar mantan Lurah Suryatmajan itu.

Sebagai Kepala UPT Malioboro, Syarif kerap dihadapkan dengan teror. Hanya saja sejauh ini bentuknya berupa teror halus dan kritik melalui SMS yang tidak beridentitas, terkait kebijakannya dalam menangani Malioboro. Namun ada juga yang memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerjanya.

"Berkomunikasi seperti *guide* wisatawan. *Say hello* kepada semua pihak. Tapi pada saat tertentu harus memiliki karakter tegas," ujarnya.

(Tri)-b

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi

1.
2.
3.

☐ Positif

☐ Segera

☐ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005